

LAPORAN
PERTEMUAN REGULER IV
KOMITE PENGELOLA DATA PERIKANAN TUNA, CAKALANG DAN TONGKOL
(KPDP-TCT) PROVINSI SULAWESI SELATAN
20 Desember 2018

Hari dan tanggal pertemuan : Kamis, 20 Desember 2018

Waktu Pertemuan (mulai dan akhir) : Mulai pukul 09:00, selesai pukul 17:00

Dibuka oleh : Safarudin

Ditutup oleh : Febrian Budianto

Lokasi Pertemuan : Ruang Pertemuan di Hotel Ibis Maipa Losari, Makassar

Peserta :

1. Aris Budiarto (Dit PSDI, KKP)
2. Safarudin (DKP Provinsi Sulawesi Selatan)
3. Febrian Budianto (DKP Provinsi Sulawesi Selatan)
4. Dewi Saprani (DKP Provinsi Sulawesi Selatan)
5. Nirfayanti Basri (DKP Provinsi Sulawesi Selatan)
6. Nurlindah (DKP Provinsi Sulawesi Selatan)
7. Kamaluddin (DKP Provinsi Sulawesi Selatan)
8. M. Sofyan (Dinas Perikanan Kabupaten Bone)
9. Hasrum (Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang)
10. Rusdin Musa (DP2 Makassar)
11. Suardi Syamsir (BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan)
12. Salmiyah (BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan)
13. Taufik Akmal (BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan)
14. Asdar (BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan)
15. A. Astuty (BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan)
16. Ratih Mustikasari (PPN Untia)
17. Tri Setianto (Poltek KP Bone)
18. Danial Sultan (UMI Makassar)
19. Baso Achmat (Kesyahbandaran Utama Makassar)
20. A. Tamsil (HNSI)
21. Akram (HNSI Makassar)
22. Sulaeman (Nelayan Bone)
23. Saripuddin (Nelayan Bone)
24. Wildan (MDPI)
25. A. Riza Baroqi (MDPI)
26. Santri Dinalhusna (MDPI)
27. Amrollah (MDPI)
28. Sahril (MDPI)

Sambutan MDPI (WILDAN)

- Terima kasih kepada DKP Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah mendukung dan mempersiapkan pertemuan KPDP TCT Sulawesi Selatan yang ke IV.
- Pertemuan ini merupakan kolaborasi semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan Tuna Cakalang dan Tongkol
- Tujuannya : bagaimana kita secara bersama-sama, berkumpul, dan berdiskusi tentang apa yang bisa kita lakukan dalam perikanan TCT untuk tetap berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan

Pengantar DKP Prov. Sulses (Kabid Perikanan Tangkap)

- Permohonan maaf dari Kadis karena tidak bisa hadir karena bertepatan dengan kegiatan PANRB di Sulawesi Selatan.
- KPDP TCT sudah sudah 4 kali dilakukan di Sulawesi Selatan, nelayan di Sulawesi Selatan cukup banyak, dan juga ada sekitar 30 ribu kapal, sebagian besar kapal yang beroperasi adalah kapal <10 GT, sehingga tidak dimungkinkan untuk mengurus SIUP dan SIPI, kecuali jika 1 orang memiliki kapal <10 GT tapi ada 2 kapal seharusnya sudah memiliki izin (SIUP).
- Sejalan dengan misi MDPI, ada penguatan nelayan, sumber daya dan peluang pasar, sebenarnya kemandirian nelayan sangat tergantung pada pengepul, dalam artian nelayan belum kuat secara financial baik dalam individu maupun kelompok masih bergantung dari tengkulak dan supplier.
- Pemerintah Pusat memiliki program Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan sebagai jaminan untuk nelayan sehingga bisa digunakan untuk peminjaman di Bank.
- Untuk pelestarian Sumber Daya, Komisi Riset Nasional , di WPP 713 ini sudah hampir merah, mulai dari ikan pelagic, ikan karang, lobster dan lain-lain, yang masih hijau hanya demersal besar saja. Yang menjadi pertanyaan apakah benar ikan di WPP 713 sudah hampir habis?.
- Pesan dan harapan kami kepada MDPI yaitu ada kegiatan yang betul-betul memperkuat nelayan kita terutama penanganan ikan diatas kapal, kedepannya bisa bekerja sama dengan DKP Prov Sulsel
- Lokasi di Palopo ada kawasan komunitas nelayan pancing sekitar 200 kapal, mungkin bisa dikembangkan untuk melakukan pendataan dan akan dibantu oleh DKP Prov. Sulsel.
- Rencana kedepan mau kami dokumentasikan untuk kegiatan memancing dari awal sampai didaratkan.

Perkembangan pencapaian dan tantangan rencana aksi KPDP TCT serta rencana strategis DKP Prov Sulawesi selatan (Pak Anto DKP Prov. Sulawesi Selatan/Sekretari KPDP TCT Sulawesi selatan)

- Pemaparaan MDPI secara singkat
- Visi MDPI sangat sejalan dengan Niat dan tujuan dari DKP Provinsi Sulawesi Selatan.
- MDPI dan DKP Provinsi Sulawesi Selatan sudah menjalankan kerjasama yang begitu baik dan lancar.
- Rencana kerja aksi bersama (Juni-Nov 2018)
 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sulit diimplementasikan untuk penerbitan SLO dan SPB, untuk di Sulawesi Selatan ada 3 orang petugas yang bertanggung jawab dan sejauh ini sudah dilaksanakan dan dijalankan.
 2. Pengukuran dan pendaftaran kapal ikan merupakan tugas rutin DKP Provinsi Sulawesi Selatan, sekitar 18 ribu kapal yang sudah diukur ulang atas kerjasama DKP Provinsi dan Kab/Kota, serta melatih 35 orang untuk cek fisik kapal dan disebar di semua kota/Kabupaten.

3. Pendidikan SKK 30 dan 60 Mil sudah dilakukan bekerja sama dengan Kesayahbandaran.
4. Identifikasi rumpon. Kami pernah Identifikasi rumpon, hanya saja rumpon agak berat, karena untuk rumpon, masyarakat banyak bertanya dan sangat sensitive mengenai rumpon. Rumpon yang ada diluar tersebar sembarangan dan tidak teratur serta tidak mengikuti PERMEN yang berlaku sekarang.
5. Banyak aksi pengawasan di laut, nelayan takut keluar tanpa izin, karena banyaknya pengawas yang ada di laut, sehingga banyak nelayan yang ditangkap oleh petugas
6. Pelatihan penanganan ikan di atas kapal Juni-Agustus (Sinjai dan Bulukumba). Penangan ikan di atas kapal merupakan hulu dari kegiatan tangkapan
7. Capacity building tentang Treacibility untuk perusahaan dan pengumpul ikan pada bulan agustus 2018
8. Penguatan kapasitas dalam rangka penanggulangan ikan dengan cara merusak. Bukan hanya merusak alam dan ekosistem tapi juga beresiko untuk nelayannya sendiri.
9. Rantai pemasaran ikan hasil tangkapan terlalu panjang, sehingga bagaimana jika ada yang praktis untuk mengurangi beban nelayan,
10. Sinergi KPDP TCT dengan LPP WPPNRI 713

Sosialisasi Progres Kerangka kerja Strategi

- Visi misi SulSel ada 5 Pilar :
 1. Bersih melayani
 2. Sehat dan Cerdas
 3. Terkoneksi
 4. Mandiri Sejahtera
 5. Berkarakter
- Gubernur memiliki misi besar untuk perikanan tangkap (Pelabuhan Higienis), sehingga bagaimana hasil tangkapan di pelabuhan bisa meningkat.
- Rencana kedepan semua pelabuhan di Sulawesi Selatan tidak lagi seperti sekarang. Kapal yang masuk ke pelabuhan akan masuk melalui satu pintu. Ada 3 pelabuhan sebagai percontohan untuk tahun 2019 yaitu pelabuhan Takabang, Bulukumba dan Lonrae Bone
- Hilirisasi sangat penting. Hasil survey menunjukkan masih banyak kelemahan di TPI dan banyak nelayan tidak memenuhi standar higienis.
- Permasalahan pembangunan perikanan tangkap.
 1. Pengelolaan pelabuhan : cikal bakan yang menjadi TPI Higienis
 2. Potensi sumber daya ikan : bagaimana kedepannya ikan yang ada tetap Berkelanjutan
- Profil perikanan Tuna Sulawesi Selatan
 1. Potensi area masuk di WPP 713 (Selat makassar, seteluk boone dan laut flores)
 2. Bone sinjai, palopo dan Pare-Pare (banyak nelayan Tuna)
 3. Banyak nelayan masih menggunakan rumpon ; pemahaman masyarakat tentang rumpon masih kurang terutama tentang peraturan yang berlaku.
 4. Produksi jika dirupiahkan sudah mendekati 0,9 T, Tuna di Sulawesi selatan sudah banyak mendapatkan hasil, sehingga harus kita kelola bersama untuk perikanan Tuna di Sulawesi Selatan.
- Sebaran pelabuhan di Sulsel ada 26 pelabuhan dan 3 prioroitas untuk pelabuhan contoh untuk pelabuhan higienis

- Rencana pengembangn bagi nelayan TCT
- Air Bersih di pelabuhan itu sangat susah, sebagian besar ikan nelayan di pelabuhan mencuci ikan menggunakan air laut, kebiasaan ini yang harus dirubah karena air laut sudah terkontaminasi,

Aris Budiarto, S.Pi. MSi (PSDI KKP)

Sosialisasi progress kerja strategi pemamfaatan ikan (harvest strategi)

kondisi perikanan tuna ada di 3 WWP yaitu (WPP 713,714,715), ada 7 aksi progress kerja untuk HS

1. Melaksanakan pertemuan terkait implementasi HS di masing-masing lokasi WPP dengan tujuan untuk:
 - a. Meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan tentang HS;
 - b. Menyepakati dan menetapkan pilihan dan rincian dari lima opsi tindakan pengelolaan perikanan yang akan dipertimbangkan dalam implementasi HS meliputi :
 - 1) pengendalian penggunaan rumpon;
 - 2) penutupan daerah penangkapan tertentu;
 - 3) pengendalian hari operasi penangkapan;
 - 4) pengendalian jumlah kapal, dan;
 - 5) pengendalian tingkat hasil tangkapan.
2. Menyepakati semua pihak untuk melaksanakan atau mendukung pelaksanaan pengumpulan data yang merupakan input utama bagi implementasi HS, meliputi:
 - a. Menambahkan data sesuai dengan form yang disepakati untuk HS sebelumnya untuk periode tahun 2016-2018, meliputi data pendaratan hasil tangkapan dan data operasional penangkapan ikan. Data tersebut akan digunakan untuk OM dan *stock assessment*;
 - b. Batas waktu penyampaian data kepada Tim Teknis HS pada tanggal 4 Maret 2019 melalui email sdi.djpt@yahoo.com dan harvesttuna@gmail.com
3. Disarankan untuk melakukan pengumpulan data sosial ekonomi lebih lanjut atau mengintegrasikan hasil kajian yang telah ada untuk mengetahui dampak lebih lanjut terkait dengan rencana implementasi tindakan pengelolaan yang akan diambil berdasarkan HS/HCR.
 - Masing-masing institusi/lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, NGOs, asosiasi perikanan dan industri perikanan dapat melakukan pengumpulan data dan/atau mengintegrasikannya kedalam sistem *database* dibawah naungan Pemerintah Pusat.
4. Disarankan untuk mempertimbangkan ulang penggunaan standarisasi data CPUE longline untuk MADIDIHANG dimana data tersebut dianggap lebih baik untuk analisis indeks kelimpahan karena tidak berasosiasi dengan rumpon.
 - a. Data aktifitas longline saat ini relatif mampu menyediakan rangkaian kelimpahan madidihang di masa mendatang.
 - b. Sedangkan data handline sebagian besar berasosiasi dengan rumpon sehingga tidak dapat digunakan sebagai indeks kelimpahan untuk madidihang di area tersebut. Diharapkan bisa didapatkan data longline dari program Observer di WPP 713, 714 dan 715.

5. Diharapkan di masa mendatang data Logbook dapat menyediakan *operational catch and effort data* sesuai kebutuhan, terutama untuk *fishing days* untuk standarisasi CPUE.
6. Menyusun mekanisme pertukaran data dari NGO, asosiasi dan industri perikanan yang kompatibel untuk dimasukkan ke dalam sistem database e-brpl dan koordinasi sistem pengumpulan data untuk implementasi HS.
 - a. Disarankan untuk tidak mengubah *platform data base* yang digunakan oleh masing-masing NGO, namun mencari *database developer* untuk mengintegrasikan sistem masing-masing NGO.
 - b. Melaksanakan pertemuan terkait data sebelum 4 Maret 2019
7. Menegaskan keterhubungan kerja kelembagaan WPP dengan implementasi HS, diantaranya dengan peningkatan peran kelembagaan WPP dalam proses penentuan alokasi sumber daya tuna (kuota tuna).
8. Menerapkan kriteria alokasi tuna untuk tiap WPP dan perikanan sesuai azas keberlanjutan, keadilan dan kepatuhan usaha perikanan.
9. Merekomendasikan penghentian penambahan ijin baru untuk perikanan MADIDIHANG yang dimanfaatkan oleh perikanan skala industri (**kapal di atas 30 GT**) hingga HS untuk madidihang ditetapkan lebih lanjut dengan melalui konsultasi publik dengan seluruh stakeholder di tahun 2019.
10. Merekomendasikan penghentian penambahan ijin baru untuk perikanan CAKALANG yang dimanfaatkan oleh perikanan industri (**kapal di atas 30 GT**) hingga *Re-Assessment* status tuna di WCPO ditetapkan lebih lanjut pada tahun 2019.
11. Pengaktifan kembali aplikasi pendaftaran kapal yang menangkap tuna di Perairan Indonesia (R-VIA) untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan perikanan tuna, cakalang dan tongkol
12. Melakukan internalisasi HS ke dalam rencana pengelolaan perikanan tuna, cakalang dan tongkol pada proses revisi Kepmen KP. No. 107/KEPMEN-KP/2015 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol untuk tahun 2020-2024
13. Melakukan reuiu pelaksanaan Kepmen No. 04/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714 terkait dengan perlindungan nelayan kecil pada tahun 2019

Sahril MDPI

Hasil pengumpulan Data I-Fish 2018 Bone

1. Metode pengumpulan/jenis data yang dikumpulkan
2. Komposisi tangkapan Tuna
3. Kapal Sampling
4. Jumlah tangkapan sampling
5. Daerah tangkapan
6. Hasil tangkapan Sampingan
7. Rata-rata tangkapan bulanan
8. Rata-rata Penggunaan umpan
9. Frekuensi panjang ikan tuna tahun 2016, 2017, 2018
10. Kegiatan tambahan
 1. Trial pendataan pelagis kecil mini purse seine

2. Alat monitoring ST dan TLC
3. WFD
4. Trial penggunaan Ifish App
5. Pelatihan SKK/BST

Wildan MDPI : Hasil Penelitian Rumpon

1. Penelitian rumpon menggunakan alat monitoring Spot Trace yang dianalisa oleh Ahmad Catur Wiyatmoko, mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Universitas Belgia
2. Data yang dikumpulkan dari Agustus 2016 – Januari 2018 dipasang di 34 kapal sampling yang berbeda, yaitu di Lombok, Kupang dan Bone.
3. Dari titik-titik spot trace, Moko menganalisa kira-kira potensi penyebaran rumpon itu, ada sekitar 136 rumpon yang diindikasikan rumpon.
4. Titik koordinat yang sama yang diikunjungi sebanyak 2 kali atau lebih ada sekitar 48 rumpon diseluruh lokasi, untuk Bone ada 11 rumpon yang terindikasi.
5. Dari data penelitian menunjukkan bahwa 1 kapal bisa mengunjungi 3-5 rumpon dalam satu kali trip.
6. Saran dari peneliti (Moko) nelayan lebih pasti mendapatkan ikan yang lebih banyak jika ditambah hari memancingnya di rumpon yang sama jika dibandingkan mengunjungi banyak rumpon.
7. Kaitan dengan pengelolaannya adalah, tidak harus memasang banyak rumpon, tetap rumpon yang ada bisa ditambah hari memancingnya, hanya saja tinggal bagaimana Pengelolaan rumpon yang ada.

Wildan MDPI : Pengenalan Sertifikasi MSC

Standar Perikanan MSC

Pengembangan standar perikanan

- Berdasarkan Code of Conduct for Responsible Fisheries FAO
- Dikembangkan melalui proses konsultasi dengan ilmuwan, industri perikanan dan kelompok Konservasi
- Hal ini mencerminkan pemahaman terkini tentang ilmu perikanan dan praktik manajemen terbaik yang diterima secara internasional.
- Hasil dan berbasis sains
- Mencakup pendekatan kehati-hatian
- Berlaku secara global

Cakupan Perikanan

➤ Cakupan Prinsip-prinsip MSC meliputi:

- Perikanan laut dan air tawar
- Perikanan tangkap di alam (termasuk namun tidak terbatas pada ikan, kerang, krustasea, dan cephalopoda).
- Kegiatan perikanan hingga, namun tidak melewati, titik dimana ikan tersebut didaratkan

Perikanan yang tidak termasuk cakupan

- Cakupan prinsip-prinsip MSC tidak termasuk:
- Budiaya perairan

- Perikanan yang dilakukan secara kontroversial unilateral dengan mengecualikan perjanjian internasional • Penggunaan praktik penangkapan ikan yang merusak, seperti menangkap dengan racun atau bahan peledak
- Perikanan yang menargetkan amfibi, reptil, burung, atau mamalia

Diskusi :

Nama	Pertanyaan	Jawaban
Sofyan DKP Kab.. Bone	<p>Mengenai izin : di Bone ada nelayan andon yang melakukan penangkapan telur ika terbang di Fak-fak dan tertangkap di Fak-Fak padahal dokumentnya lengkap.</p> <p>Yang menjadi pertanyaan adalah : mengenai aturan, alat tangkap yang digunakan untuk telur ikan terbang ?</p>	<p>Pak Anto : Terkait dengan andon, salah satu kendala adalah kerjasama antr provinsi yang kurang. Nelayan sulser tersebar di seluruh Indonesia. DKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan 7 kerjasama andon yang sudah dilakukan yaitu : Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, NTB, NTT, Bali, Jawa tengah dan Fak Fak.</p> <p>Kejadian untuk penangkapan telur ikan terbang : nilai ekspor telur sangat tinggi, di SIUP izinnya adalah pancing + Alat bantu tangkap (Rumpon/rumbai). SIUP SIPI sudah lengkap, di SIPI yang menjadi permasalahannya karena alat tangkapnya pancing. DKP Prov, sudah berkoordinasi dengan KKP mengenai masalah ini dan solusi yang mungkin bisa diambil.</p> <p>Wildan : sudah ada RPP yang mengatur untuk kegiatan ini dimana RPP ini menerangkan : alat tangkapnya, jenis kapalnya.</p> <p>Pak Aris : sejak tahun 2015 sudah ada RPP yang mengatur telur ikan, yang perlu diperbaiki untuk RPPnya khusus untuk penangkapan telur ikan. Dalam RPP belum ada batas untuk berapa total tangkapan telur yang bisa diambil. Di Indonesia hanya ada 2 provinsi yang melakukan menangkap telur ikan : yaitu nelayan Sulsel dan</p>

		SulBar. Perlu ada aturan untuk mekanisme andon untuk pengaturan armada kapal.
Bappeda	<p>Komoditi tuna sulsel memiliki potensi produksi 2000 ton, dan merupakan komoditi ekspor.</p> <p>1. Kenapa komoditi tuna tidak terlalu blomiing seperti bandeng, rumput laut dan udang dan tidak termasuk dalam komoditi unggulan di Provinsi Sulawesi Selatan?</p> <p>2. Bagaimana menjaga kesinambungan untuk komoditi tangkap untuk tuna cakalang dan tongkol</p>	<p>1. untuk WPP 713 ada 11 Provinsi yang masuk dalam wilayah WPPRI 713, bukan hanya SulSel saja yang memanfaatkan potensi laut khususnya untuk Tuna.</p> <p>2. utuk menjaga Sumber Daya Ikan sangat susah, beda dengan budidaya. Dilaut, banyak permasalahan mulai dari nelayan, kapal, izin, petugas dan lainnya dan potensi yang ada tidak bisa diperkirakan secara pasti dan sembarangan, sehingga salah satu upaya adalah adanya Pengelolaan dan salah satunya adalah buka tutup lokasi tangkap dan bisa juga pembatasan alat tangkap, Surat Izin dan buka tutup kawasan. Ada 43 komoditas yang tertangkap oleh nelayan di sulawessi selatan. Oleh karena itu perlu adanya juga TPI Higienis sebagai upaya untuk menjaga kualitas dan nilai jual dari komoditas di Sulawesi Selatan.</p> <p>Tambahan :</p>
Pak Baso	<p>Saran : Terkit dengan rumpon, mengenai pemasangan rumpon perlu diperhatikan karena berkaitan dengan alur pelayaran, karena kapal-kapal asing melintas dan merupakan jalur kapal, mungkin bisa berkoordinasi dengan Navigasi</p>	
Daniel FKIP	<p>Masukan Nelayan :</p> <p>1. Kemudahan dalam pengurusan surat izin, karena akses untuk ke Provinsi sangat mahal.</p> <p>2. Hasil penelitian dari mahasiswa bimbingan : Illegal fishing, yang menjadi korban adalah nelayan, dan yang menikmati adalah</p>	<p>1. Terkait dengan nelayan: untuk kapal 10 – 30 GT pengurusan izin di PTSPT provinsi, untuk mempercepat proses perizinan sudah dicoba dilakukan kerja sama dengan PTSP dan membuka gerai untuk kab/kota dalam</p>

	<p>orang dibelakang (Pusat), tidak semua nelayan bisa membuat alat tangkap illegal, taapi yang menjadi pemasoknya adalah aparat/petugas</p> <p>3. Pelabuhan higienis kita perlu kerja keras dan kerjasama, kita perlu siapkan sarana dan prasaranan untuk menunjang pasar higienis. Dan perlu kajian yang lebih, termasuk model Pengelolaan.</p>	<p>mempercepat pengurusan document, hanya saja belum maksimal karena banyak kendala/masalah yang terjadi dilapangan.</p> <p>2. Illegal fishing : tidak habis dilakukan di laut, mahal dan terus bertumbuh, dan menjadi miris karena penegak hukumnya yang melakukan dan mendukung untuk kegiatan illegal fishing. Sangat susah mencegah illegal fishing karena nelayan makin canggih juga untuk menghindari pengawas</p> <p>3. Meneyediakan keranjang, bak sampah dan sterofoam, anggaran setiap Kabupaten 200 juta per kabupaten untuk bahan dan alat yang disiapkan tapi belum bisa direlasasikan semua</p>
<p>Pak Anto</p>	<p>1. Terkait dengan e-logbook apakah berlaku untuk semua kapal, karena data-data yang ada di DKP Provinsi banyak kapal yang <10 GT yang melakukan penangkapan.</p> <p>2. Terkait alat tangkap cantrang dilarang tapi kenyataan di lapangan banyak yang masih beroperasi</p> <p>3. untuk sistem R-VIA ini untuk kapal apa, dan teknis penggunaannya bagaimana?</p> <p>4. rumpon apakah semua diampuni untuk masalah rumpon, karena rumpon di Sulawesi selatan banyak rumpon tradisional.</p>	<p>1. wajib untuk kapal diatas 30 Gt kalau dibawah 30 GT tidak wajib cuman harusnya ada juga catatan</p> <p>2. PERMEN 02 ada beberapa yang tidak jalan dan belum bisa ikuti PERMEN dan susah merubah kebiasaan nelayan.</p> <p>3. Cara pendaftarannya gampang, Bapak kumpulkan 20 orang data pemilik kapal dan tinggal hubungi orang SDI diusahakan akan langsung datang ke provinsi</p> <p>4. tetap di laporkan rumponnya agar tidak di potong dan kalau bisa lokasinya di laporkan , untuk izin lagi atur revisi izin antara rumpon dan kapal kedepanya harus di</p>

		atur,
Pak Tamsir HNSI SulSel	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengenai Rumpon, kapalnya 10 – 15 GT dan rumponnya diatas 20 mill. bagaimana cara izinnya apakah terpisah antara rumpon dengan kapal 2. Mungkin ada model pendaataan yang baru selain dari logbook 3. Transitment itu bukan sekedar sedang memindahkan muatan, tetapi kapal rata rata semua kapal pengumpul, karena transitment ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kegiatan ini. 4. Tentang andon Harus ada perbaikan untuk semua provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lagi disusun dan rumpon ini tidak dilarang tapi diatur nelayan harus ada kartu KUSUKA, untuk mendapatkan bantuan harus memiliki kartu KUSUKA. 2. Usulnya bagus selaku untuk saran Kamera di Pelabuhan, kami juga sudah mencoba melakukan pemasangan kamera di Kapal di Bitung 23 Kapal , Mayangan 3 Kapal, Bali ada 3 Kapal. hanya saja belum efektif dan masih diujicobakan. 3. Transitment yang dilarang oleh bu Susi adalah jenis transaksi pemindahan muatan di tengah laut, bahwasanya boleh hanya saja harus pasang kamera dan harus ada Observer. 4. Untuk masalah andon, memang rencananya PERMEN usaha, andon akan direvisi dan akan dihapus, syaratnya kapalnya harus <10 GT, dan masih akan memalui proses penyepakatan di KKP perlu juga ada surat keterangan, agar tidak menjadi masalah di tengah laut.
Wildan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan logbook, perlu diuji cobakan dlu, bagaimana respon dari Masyarakat dan pemangku kepentingan/nelayan. Dari data loogbok sangat bagus sekali untuk menghitung CPUE, bisa ada gambaran dari kondisi lautan yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kita sudah sepakat bahwa akan ada SIPI di cabut karena tidak patuh logbook diantaranya adalah tidak mengisi logbook dan mengisi tapi logbook dengan tidak benar. Kedepannya KKP akan melakukan konfrensi pers

	<p>sekarang. Mengenai tangkapan sampingan, ketika suatu perairan hasil tangkapan sampingan nelayan lebih banyak dari hasil tangkapan target, menandakan kondisi di laut itu sudah tidak sehat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Apakah bisa diberikan reward untuk nelayan/supplier yang secara patuh memberikan data dan setor data/isi logbook. 3. Mengenai kamera Kami dari MDPI melakukan pemasangan kamera di atas kapal namanya TLC, namun, kendalanya adalah harus ada yang mengecek data/hasil yang direkam oleh kamera. kami membutuhkan tenaga untuk menganalisis data yang sudah terekam oleh kamera tersebut. 4. MDPI melakukan pendataan masih kecil untuk mengenai skala/luasan wilayahnya, karena sejauh ini kami sampling hanya beberapa tempat, mungkin dari pihak/pemangku kepentingan lainnya untuk memunculkan data yang didapatkan. 	<p>untuk masalah pemangku kepentingan yang tidak melakukan pengisian logbook akan dicabut izinnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memang komposisi tangkapan sampingan masih susah untuk didapatkan, sejauh ini yang dilaporkan memang hanya untuk tangkapan Utama saja, untuk tangkapan sampingan tidak tercatat. 3. Ide untuk reward ke nelayan akan kami sampaikan ke Dirjen budget kapalnya bisa dikurangi untuk pengadaan reward nelayan. 4. Mengenai kamera, MDPI memang sudah melakukan pemasangan kamera di kapal, tetapi kamera yang dipasang oleh KKP di bitung merupakan kamera bertekhnologi tinggi, dia hanya akan merecord berdasarkan sensor, karena yyang diamati pada saat transitmen saja.
<p>Pak Tamsir (HNSI Sulawesi selatan)</p>	<p>Tanggaapan : semua posisi rumpon yang diberikan oleh nelayan Bone sangat akurat untuk informasi yang diberikan ini sangat membantu sekali.</p> <p>Ukuran ikan mungkin bisa dimunculkan, dan kita bisa tahu, karena kami dari perguruan tinggi sangat konsen dengan ukuran apakah ukuran tersebut sudah bisa ditangkap atau belum layak ditangkap.</p>	

	<p>Masukan : MDPI sudah berjalan sudah hamper 3 tahun lebih. Alangkah baiknya ada petaa penyebaran ikan tuna. Yang melakukan migrasi berdasarkan ukuran ikan. Mungkin ada data/analisis penyebaran pemetaan ikan-ikan yang tertangkap berdasarkan ukuran.</p>	
	<p>1. Setahu saya handline itu menangkap ikan Dasar saja seperti kakap dan kerapu, Di data yang ditampilkan ada cakalang, Tuna dan tongkol, untuk HL itu bagaimana modelnya? Apakah beda cara pancingnya? Atau model pancingnya beda??</p>	<p>1. Handline sebenarnya bukan hanya saja menangkap ikan dasar saja, melainkan Handline itu menangkap ikan tuna juga, karena teknik memancing yang digunakan juga berbeda, memang sama-sama hanya menggunakan senar dan gulungan saja, tetapi handline yang memancing tuna biasanya memancing dirumpon, rumpon tersebut merupakan tempat ikan-ikan mencari makan, sehingga ikan tuna juga ikut bergabung di rumpon. Teknik yang digunakan sama saja dengan handline ikan dasar, hanya saja mungkin yang beda adalah kedalaman dan area memancingnya yang beda.</p>
<p>Pak Nelayan</p>	<p>Tanggapan : tergantung dari isi rumpon yang dikunjungi, jika memannng ikan yang tersedia di rumpon banyak, maka nelyn bsa bertahan dalam waktu lebih lama.</p>	
<p>Pak Tamsir</p>	<p>ketika didoroong utuk menuju sertifikasi, apakah ada gambaran untuk komponen biayanya</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Manfaat untuk nelayan sertifikasi MSC tidak menjamin prinsip social, karena MSC lebih fokus untuk perikanannya. ➤ Setelah perusahaan mendapatkan sertfikasi MSC, perusahaan tersebut akan terus mempertahankan bagaimana nelayan dan perusahaan bisa menjaga dan ikuti standart dari MSC.

		Mengenai biaya, butuh 3-7 orang aksesori yang harus dibayar kira-kira \$300 rbu.
Pak Anto	kendala kita di Indonesia adalah multi spesies dan multi gear, ada alat tangkapan yang bisa menangkap 2-4 jenis ikan. Sebenarnya untuk mendapatkan sertifikasi ini sangat bagus. Apakah data kita ini sudah benar? Dan sudah bisa memenuhi standar MSC?	Untuk masalah multi Gear dan multi jenis tangkapan, digunakan Unit of Assessment (UOA) dimana tidak semua diasemnet tetapi yang diassessment adalah berdasarkan rekomendasi dari perusahaan yang menginginkan sertifikasi MSC. Tambahan dari pak Aris : saat ini yang sedang dalam proses adalah AP2HI dan APRI,
Pak Baso	Yellowfin saja yang muncul, yang bluefinnya kemana?	Pertama kita melihat dulu apakah nelayan kita menangkap Bluefin apa tidak, karena sebagian besar nelayan di Indonesia menangkap yellowfin, kecuali di Bali. Bluefin tidak disertifikasi karena pasarnya Jepang, dan juga Bluefin tanpa sertifikasipun harganya sudah tinggi/mahal.

RENCANA KERJA KPDP DESEMBER 2018 – MEI 2019

SMART

Specific, Measurable, Agreed, Realistic, Time-Frame

No	Kegiatan	Indikator keberhasilan	PIC	Dana	Waktu
1	Pengumpulan data hasil tangkapan di lokasi terpilih, sebagai data pendukung <i>Harvest Strategy</i>	Laporan analisa hasil pengumpulan data.	MDPI, Nelayan, Supplier	MDPI	Dec 2018 – Mei 2019
2	Pengumpulan data di Kabupaten/kota sebagai bahan estimasi jumlah produksi hasil tangkapan ikan di Prov. Sulawesi Selatan	Tersedianya hasil pengumpulan data dan di verifikasi	DKP Provinsi, Kab. Dan Kota	APBD	Januari – Mei 2019
3	Laporan Triwulan kegiatan tetap dilanjutkan untuk di update ke Anggota Komite.	Ringkasan laporan kegiatan MDPI	MDPI	MDPI	Februari 2019
4	Sosialisasi training cara penanganan ikan yang baik	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakan 1 Kali di Bone - Dinas Perikanan Kab. Bone Bersurat kepada Dit KAPI sebagai permohonan narasumber 	Dinas Perikanan Bone, MDPI, Nelayan, Supplier Bone, Dit KAPI-KKP	Dinas Perikanan kabupatenBone dan MDPI	Februari-Maret 2019
5	Melibatkan mahasiswa dalam magang/PKL pengumpulan data perikanan TCT	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya mahasiswa / Siswa yang ikut magang 	Poltek KP Bone, SUPM, UMI Makassar, UNHAS, nelayan, Supplier	Poltek KP Bone, SUPM, UMI Makassar, UNHAS, MDPI	Januari – Mei2019
6	Pelatihan BST dan SKK 60 mil	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi terkait jadwal pelatihan - Adanya Surat permohonan pengajuan peserta diklat kepada PIP 	Kesyahbandaran Utama Makassar/PIP Makassar	Kesyahbandaran Utama Makassar/PIP Makassar , MDPI	Menyesuaikan jadwal PIPP

		Makassar			
7	Support pengurusan dokumen dan pendaftaran kapal (Pas besar/pas kecil)	- Bertambahnya kapal yang memiliki dokumen kapal (Pas besar/pas kecil/BPKP)	Dinas Perikanan Kab. Bone, Kesyahbandaran Utama Makassar, KUPP Bone	Kesyahbandaran Utama Makassar, KUPP Bone, MDPI, nelayan, supplier	Januari – Mei 2019

Dokumentasi

